

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media
- Gulthom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan*. Media Press Ind.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenda Media.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Smith, R. K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto,(2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafis.

B. Jurnal

- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. *Lex Lata*. DOI: <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 153-163. DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>

- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109. DOI: <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>
- Harviani, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1347>
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital”, *Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 86–87. DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6546.100-107>
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyoy, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197–216. DOI: <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>
- Suryani, D. E., Ablisar, M., Marlina, M., & Leviza, J. (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID. SUS/2010). *USU Law Journal*, 3(2), 179-191.
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3148).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri E).

D. Website

- Annisa Firdausi, “Manusia Silver di Sidoarjo Kembali Marak, Desak Penanganan Segera”. Radarsidoarjo.id (online), 27 Juni 2023, diakses pada 06 Juni 2026. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2306270001/manusia-silver-di-sidoarjo-kembali-marak-desak-penanganan-segera>.
- Asmaul Chusna, “Polres Blitar Kota Tangkap Sindikat Kasus TPPO”, jatim.antaranews.com (online), 20 Mei 2026, diakses pada 06 Juni 2026. <https://jatim.antaranews.com/berita/1067348/polres-blitar-kota-tangkap-sindikata-kasus-tpo>.
- Syamsul Huda, “Polda Jatim Bekuk Pemuda Penyebar Konten Asusila Anak di Medsos”, tvonenews.com (online), 20 Agustus 2025, diakses pada 06 Juni 2026. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/363332-polda-jatim-bekuk-pemuda-penyebar-konten-asusila-anak-di-medsos>.
- Willi Irawan, “Polda Jatim Bongkar Jaringan Jual Beli Konten Pornografi Anak”, jatim.antaranews.com (online), 13 Juni 2025, diakses pada 06 Juni 2026. <https://jatim.antaranews.com/berita/932273/polda-jatim-bongkar-jaringan-jual-beli-konten-pornografi-anak>

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses tanggal 3 Agustus 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Website DP3AK Provinsi Jawa Timur. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2025. <https://dp3ak.JawaTimurprov.go.id/>.

Website DP3AK Provinsi Jawa Timur. Regulasi, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2025.

<https://dp3ak.JawaTimurprov.go.id/halaman/statiskumpulanperaturanL0dKk89264911b95e58901a4a13727224836cc4cc24be>.

E. Lain-lain

Wawancara bersama staff bidang divisi advokasi/hukum PPHA DP3AK Provinsi Jawa Timur

Wawancara bersama kepala seksi penanganan & Kedaruratan UPT PPA Jawa